

**RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2023**



*Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui
Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura*

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2022**

KATA PENGANTAR

Penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini disusun berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu (tahun 2021).

Berpedoman pada Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, tujuan penyusunan rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta sebagai pedoman untuk mencapai target kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu, tujuan penyusunan rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah; dan
- b. Hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu.

Rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Kuala Tungkal, Maret 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjab Barat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	26
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	40

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021-2026, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dalam Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan fokus kegiatan untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sebesar 2%. Dengan

terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam segi penyediaan sarana pertanian, maka perlu penetapan kegiatan-kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Oleh karena itu, perancangan kegiatan dan alokasi dana ke dalam RKA-OPD kabupaten menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran/output program.

Perlu disadari bahwa kinerja serta efektifitas dan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan pertanian merupakan hasil kerja kolektif dari upaya dan kinerja berbagai unit kerja instansi terkait serta petani/masyarakat dan pelaku dunia usaha lainnya secara sinergis. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, hingga pelaksanaan dilapangan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian output program.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 145 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk tahun 2023 di Lingkup Pertanian (Bidang Hortikultura, Tanaman Pangan, Penyuluhan dan Sarana dan Prasarana).

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mendorong unit kerja lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura agar melaksanakan tugas secara optimal, terpadu dan terarah berdasarkan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
- 2) Merupakan tolak ukur penilaian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 3) Memudahkan pemahaman dan penilaian seluruh jajaran aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap arah kebijakan dan program-program operasional tahunan yang telah ditetapkan.

- 4) Memberikan acuan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyusun kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan pagu indikatif untuk satu tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan berjalan, dan situasi perekonomian dan keuangan negara yang sedang terjadi saat ini. Dimana, seperti yang kita ketahui, tahun 2020 adalah tahun dimana pandemi sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan aktivitas-aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Tidak hanya itu saja, pandemi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

Sebagai respon atas dampak pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan dua kali penyesuaian postur APBN yakni melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020, yang selanjutnya disesuaikan lagi melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020. Perubahan tersebut menampung biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) serta realokasi anggaran/refocusing kegiatan pada belanja K/L untuk mendukung kebijakan PC-PEN. Penanganan dampak pandemi melalui program PEN di berbagai sektor, yaitu

Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral K/L dan Pemda, UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan Insentif usaha. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan realokasi dan *refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara menyeluruh untuk penanganan Covid-19 serta untuk pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Selain berbagai macam permasalahan yang disebutkan di atas, masih ada satu lagi permasalahan/tantangan yang akan dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan harus dicari solusinya. Permasalahan/tantangan yang dimaksud adalah terkait kewenangan penyediaan sarana pertanian. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menyimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan sarana pertanian (seperti penyediaan benih, bibit, pupuk, dan pestisida). Sedangkan bantuan sarana produksi pertanian merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi petani dalam upaya meningkatkan produksi dan untuk mencapai target produksi pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra OPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	6	8	14	16	18	20	20
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
3.27.0	Program Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Dengan Pelayanan Lancar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.27.01.2.0	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Lancar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.27.01.2.01.0	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Renstra, Renja, RKA	42 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	16,67%	16,67%
3.27.01.2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Statistik Pertanian	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	16,67%	16,67%
		Laporan Evaluasi	30 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	16,67%	16,67%
3.27.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.27.01.2.02.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium Administrasi Keuangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100%	1 Orang	100,0%	100,0%
3.27.01.2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.27.01.2.05.0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.566 Stel		261 Stel	261 Stel	100%	261 Stel	16,67%	16,67%
3.27.01.2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	72 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	16,67%	16,67%
3.27.01.2.06.0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	16,67%	16,67%
3.27.01.2.06.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	90 Paket/Buku		15 Paket/Buku	15 Paket/Buku	100%	15 Paket/Buku	16,67%	16,67%
3.27.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	4362 Kotak		727 Kotak	564 Kotak	64%	727 Kotak	11%	11%
3.27.01.2.06.0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan (blangko atau formulir atau yang lainnya) dan penggandaan	216 Paket/Buku		36 Paket/Buku	36 Paket/Buku	100%	36 Paket/Buku	16,7%	16,7%
3.27.01.2.06.0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	16,7%	16,7%

3.27.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	16,7%	16,7%
3.27.01.2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	8%	8%
3.27.01.2.08.0	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	75 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	8%	8%
3.27.01.2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	17%	17%
3.27.01.2.08.0	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan Surat Menyurat	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	50%	12 Bulan	17%	17%
3.27.01.2.08.0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi Air dan Listrik	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	50%	12 Bulan	17%	17%
3.27.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya Kebutuhan Pelayanan Kantor	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	50%	12 Bulan	17%	17%
3.27.01.2.0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804 Unit		134 Unit	134 Unit	96%	134 Unit	17%	17%
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	6 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	17%	17%
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Terpelihara	702 Unit		117 Unit	116 Unit	99%	117 Unit	17%	17%
3.27.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC Milik Kantor yang Terpelihara	90 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	17%	17%

		Jumlah Laptop/PC Milik Kantor yang terpelihara			7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	17%	17%
		Jumlah Laptop/PC Milik Kantor yang terpelihara			1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%
3.27.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Terpelihara	6 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	17%	17%
3.27.0	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		12%		2%	0	0	2%	0	0
3.27.02.2.0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		12%		2%	0	0	2%	0	0
3.27.02.2.01.0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sosialisasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	18 Kali		3 Kali	0		3 Kali	16,67%	16,67%
			10 Ha		0	10 Ha	100%	0	100%	100%
3.27.02.2.01.0	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sosialisasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	18 Kali		3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	16,67%	16,67%
3.27.02.2.0	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		12%		2%	2%	100%	2%	0	0
3.27.02.2.02.0	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya bibit hortikultura hasil kultur jaringan berlabel	12.000 Benih Pisang		2000 Benih Pisang	2000 Benih Pisang	100%	2000 Benih Pisang	16,67%	16,67%
		Tersedianya Benih Padi Unggul bermutu untuk Penangkaran	150 Ha		25 Ha	25 Ha	100%	25 Ha	16,67%	16,67%

3.27.0	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		65,09		62,55	62,55	100%	62,55	0	0
3.27.03.2.0	Pengembangan Prasarana Pertanian		12%		2%	2%	100%	2%	0	0
3.27.03.2.01.0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	Jumlah Sosialisasi/Pembelajaran, Penerapan Informasi dan Teknologi, Peran Serta Kelompok Tani Dalam Perluasan Areal Pertanian	12 Kali		2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	17%	17%
3.27.03.2.0	Pembangunan Prasarana Pertanian		12%		2%	2%	100%	2%	0	0
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Sumber Irigasi Air Tanah Dalam yang dibangun	18 Unit		3 Unit	2 Unit	67%	3 Unit	11,11%	11,11%
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun	10 KM		3 KM	3 KM	100%	3 KM	30%	30%
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP beserta Sarana Pendukungnya yang dibangun/diperbaiki	5 BPP		8 BPP	8 BPP	100%	8 BPP	160%	160%
3.27.03.2.02.0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Air Mendukung Pertanian	18 Kali		3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	16,67%	16,67%
		Desain Pengembangan Jaringan Irigasi	6 Dok.		1 Dok.	1 Dok.	100%	1 Dok.	16,67%	16,67%
		Pendampingan Kegiatan DAK Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun 2021	6 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	16,67%	16,67%
3.27.0	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100%		100%	100%		100%	100%	100%
3.27.05.2.0	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana		100%		100%	100%		100%	100%	100%

	Pertanian Kabupaten/Kota									
3.27.05.2.01.0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sarana Brigade Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan	5.100 Liter/Kg		100 Liter/Kg	24%	24%	100 Liter/Kg	0,47%	0,47%
3.27.05.2.01.0	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Lahan Sawah yang Mendapatkan Subsidi AUTP	18 Kali		3 Kali	100%	100%	3 Kali	16,67%	16,67%
3.27.0	Program Penyuluhan Pertanian		150%		25%	100%	100%	25%	25%	16,67%
3.27.07.2.0	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%		100%	100%	100%	100%	0%	0%
3.27.07.2.01.0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	13 Kecamatan		13 Kecamatan	13 Kecamatan	100%	13 Kecamatan	100	100
3.27.07.2.01.0	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan Honor PPL-THL, UKB, ATK, dan Perlengkapan BPP	72 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	16,67%	16,67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pilihan bidang pertanian. Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Padi - Jagung - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Duku - Durian - Jeruk - Pisang - Nanas - Jahe										
			1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	5,45%	1,99%	
			1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	3,61%	1,97%	
			3%	3%	3%	3%	3%	3%	68,54%	3%	
			2%	2%	2%	2%	2%	2%	18,2%	2%	
			1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	- 12,42%	1,88%	
			1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	-2%	1,94%	
			1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	39,5%	1,93%	
			2%	2%	2%	2%	2%	2%	40%	2%	
			1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	24%	1,99%	
	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	20%	2,3%			
	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	4,15%	1,96%			
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan (%)		62,55	63,18	63,81	64,45	64,55	65,09	59,32	63,18	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani		25%	17,16%	25%	25%	25%	25%	17,16%	25%	

2.2.1 Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai melalui penilaian berbagai indikator kinerja dengan membandingkan dengan target yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward and punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan (ditargetkan). Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang cocok dan relevan untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) pada tahun berikutnya. Dalam memberikan penilaian

tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut.

Tabel 2.3 Skala Pengukuran Capaian indikator Kinerja

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut.

SKor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut.

SKor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	66	66,58
2.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	126,40	134,23
			Peningkatan Produktivitas Hortikultura	288,50	61,55

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikategorikan "BAIK". Untuk indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, realisasi yang dicapai melebihi target (≥ 100). Begitupun untuk Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (kw/Ha), realisasi yang dicapai juga melebihi target (≥ 100). Sedangkan untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produktivitas Hortikultura (kw/Ha), realisasinya masih bersifat sementara di angka 21,44% karena data pendukungnya belum sepenuhnya terkumpul.

Meskipun pada Tahun 2021 pemerintah daerah masih melakukan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi. Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berjalan karena didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi melalui Dana DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Pertanian dan Dana Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2021, Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, seperti : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura ~ Jeruk 10 Ha, Bantuan Benih Padi Inbrida ~ 1.500 Ha, Bantuan Paket Kacang Tanah ~ 100 Ha, Bantuan Paket Padi Lahan Kering ~ 327,5 Ha, Bantuan Benih Jagung ~

500 Ha, Bantuan Paket Padi Biofortifikasi ~ 462 Ha, Bantuan Benih Padi Sawah PEN ~ 1.425 Ha, Bantuan Paket Padi Rawa ~ 500 Ha, Bantuan Paket Kedelai PEN ~ 200 Ha, Bantuan Benih Padi Sawah ~ 3.000 Ha, Pembangunan Jalan Pertanian ~ 7 Unit, Pembangunan Embung Pertanian ~ 1 Unit, Rehab Jaringan Irigasi Tersier ~ 29 Unit, Kegiatan Registrasi Kebun/Lahan Komoditas Hortikultura ~ 3 Kelompok Tani, Bantuan Sarana Pascapanen ~ Power Thresher 4 Unit, Bantuan Sarana Pascapanen ~ UPH 1 Unit, Bantuan Sarana Pascapanen ~ CHK 2 Unit, Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ~ 2 Unit, Pembangunan Jalan Pertanian ~ 3 KM, Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP ~ 8 Unit, Renovasi BPP Kecamatan Tungkal Ilir ~ 1 Unit, Pengembangan Kawasan Jahe ~ 10 Ha, Pengembangan Kawasan Pisang ~ 1,5 Ha, dan Kegiatan Penyuluhan Pertanian.

2.2.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung-jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

Tabel 3.4 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target & Realisasi Fisik			Daya Serap Keuangan	
			Target	Realisasi	%	(Rp.)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>	<i>7</i>
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.172.471.565	100	100	100	1.927.260.866	89

A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	186.644.000	12 Bulan	12 Bulan	100	186.632.000	99,99
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.022.000	7 Dok.	7 Dok.	100	57.010.000	99,98
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Belanja Barang dan Jasa	129.622.000	5 Dok.	5 Dok.	100	129.622.000	99,99
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	11.188.236.371	1 Laporan	1 Laporan	100	10.398.958.883	92,95
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.049.436.371	94 Orang	94 Orang	100	10.270.558.883	92,95
4	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	6.000.000	18 Orang	18 Orang	100	6.000.000	100
C	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		12 Bulan	12 Bulan	100		94,30
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.700.000	261 Stel	261 Stel	100	95.905.600	94,30
D	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.013.316.065	12 Bulan	12 Bulan	100	643.416.808	63,50
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.201.186	12 Bulan	12 Bulan	100	5.201.186	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.358.004	15 Paket/Buku	15 Paket/Buku	100	101.754.116	94,78
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.175.000	12 Bulan	12 Bulan	100	4.031.000	22,18
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.741.875	36 Paket/Buku	36 Paket/Buku	100	56.373.000	92,81
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100	3.370.000	56,17
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	815.840.000	12 Bulan	12 Bulan	100	472.687.506	53,94
E	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	40.000.000	6 Unit	6 Unit	100	39.930.000	99,83
12	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	40.000.000	6 Unit	6 Unit	100	39.930.000	99,83
F	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	344.593.500	12 Bulan	12 Bulan	100	325.232.588	94,38
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100	3.000.000	100,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.993.500	12 Bulan	12 Bulan	100	93.632.588	82,87
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.600.000	12 Bulan	12 Bulan	100	228.600.000	100
G	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	695.570.000	134 Unit	134 Unit	100	629.143.870	90,45
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.596.000	1 Unit	1 Unit	100	37.720.768	97,73

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.950.000	116 Unit	116 Unit	100	448.459.102	89,17
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.968.000	16 Unit	16 Unit	100	28.908.000	74,18
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.056.000	1 Unit	1 Unit	100	115.056.000	100
II	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	591.837.547	100	100	100	566.632.738	95,74
<i>H</i>	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>409.460.119</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	100	<i>385.075.310</i>	<i>94,04</i>
20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	355.000.000	10%	10%	100	330.666.560	93,15
21	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	54.460.119	3 Kali	3 Kali	100	54.408.750	99,91
<i>I</i>	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>182.377.428</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	100	<i>181.557.428</i>	<i>99,55</i>
22	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	182.377.428	2.000 Bibit	2.000 Bibit	100	181.557.428	99,55
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.395.858.451	62,55	59,94	95,83	2.631.728.300	77,50
<i>J</i>	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>102.244.600</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	100	<i>92.621.400</i>	<i>90,59</i>
23	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	102.244.600	46 Ha	46 Ha	100	92.621.400	90,59
<i>K</i>	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>3.462.613.851</i>	<i>41,55</i>	<i>41,55</i>	<i>91,67</i>	<i>2.718.681.900</i>	<i>78,52</i>
24	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	855.000.000	3 Unit	2 Unit	66,67	200.000.000	23,39
25	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	700.000.000	3 KM	3 KM	100	700.000.000	100,00
26	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.390.438.851	9 Unit	9 Unit	100	1.364.468.400	98,13
27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	348.175.000	1 Dok	1 Dok	100	274.638.500	78,88
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69.553.500	100%	100%	100	69.553.500	100
<i>L</i>	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>69.553.500</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	100	<i>69.553.500</i>	<i>100</i>
28	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	25.200.000	24 Kg	24 Kg	100	25.200.000	100
29	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	44.353.500	2 Kali	2 Kali	100	44.353.500	100
V	Program Penyuluh Pertanian	1.354.460.253	25%	25%	100	1.345.047.103	99,31

<i>M</i>	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>120.265.000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>118.941.850</i>	<i>98,90</i>
30	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	120.265.000	2 Poktan	2 Poktan	100	118.941.850	98,90
31	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.234.195.253	12 Bulan	12 Bulan	100	1.226.105.253	99,34
Total		19.150.769.687			99,17	17.111.761.390	89,35

Dari tabel di atas, Realisasi keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 hanya mencapai 89,35%. Pencapaian realisasi keuangan sebesar 89,35% ini disebabkan karena :

1. Adanya refocusing anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang pada awalnya pagu anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini dianggarkan sebesar Rp. 11.188.236.371. Dimana, refocusing anggaran pada Kegiatan ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan perubahan mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 hingga mengalami 3 (tiga) kali Mendahului Perubahan. Realisasi anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebesar 10.398.958.883 atau sebesar (92,95%). Sisa anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah sebesar Rp. 778.877.488.
2. Adanya penghematan anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dimana, anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini direncanakan sebesar Rp. 815.840.000. Dan realisasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar 472.687.506 atau sebesar (57,94%). Salah satu penyebab efisiensi/penghematan anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini karena pada Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih berlangsung yang menyebabkan semua aktivitas

menjadi terbatas (adanya pembatasan bahkan pelarangan masuk ke suatu wilayah/daerah).

3. Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp.285.000.000 per unit nya. Setelah diverifikasi, pekerjaan Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ini hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) unit saja dan anggaran yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ini hanya sebesar Rp. 100.000.000 per unit nya. Sehingga, dari total pagu anggaran Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang sebesar Rp. 855.000.000, realisasi keuangannya hanya sebesar Rp. 200.000.000 (23,39%). Sisa anggaran pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ini adalah sebesar Rp. 655.000.000.
4. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan rutin/wajib maupun pada program dan kegiatan urusan pilihan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat tani yang mempunyai kemampuan untuk mengubah struktur kelembagaan. Perubahan struktur kelembagaan petani dimulai dari pengelolaan kegiatan produksi sampai dengan kegiatan ekonomi yang produktif. Reformasi pembangunan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di masyarakat, karena sektor pertanian akan diarahkan menjadi sektor andalan dan sebagai mesin penggerak perekonomian nasional.

Dalam upaya mengantisipasi era keterbukaan, kebijakan pembangunan pertanian semakin dipertajam dan difokuskan pada enam hal, yaitu :

1. Terjaganya luas lahan sawah,
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura,

3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing tanaman pangan dan hortikultura,
4. Menjaga Keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
5. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Komoditi tanaman bahan makanan yang dikembangkan saat ini, antara lain : padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, buah-buahan sayuran tahunan, sayuran buahan semusim, dan tanaman biofarmaka. Dalam pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan gambaran umum dimuka, ditemui permasalahan yang harus di atasi untuk dapat memberikan dayaguna yang lebih optimal bagi kehidupan dan kesejahteraan petani, antara lain :

1. Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan (luas lahan sawah) semakin menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Banyaknya lahan pertanian sub sektor tanaman pangan yang beralih fungsi ke lahan pertanian lainnya atau ke sektor lainnya.
2. Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global mengakibatkan bencana kekeringan dan banjir rob sehingga menimbulkan resiko kegagalan produksi pangan.
3. Rendahnya Luas tambah tanam tanaman padi di musim tanam April - September. Spesifikasi lahan pertanian di lahan surut tidak bisa menjamin tanam dua kali (tanam di musim tanam Asep - September).
4. Upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai (PAJALE BABE).
5. Perluasan lahan pertanian tanaman pangan (cetak sawah), dan
6. Pengembangan dan perluasan irigasi rawa terpadu.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta disesuaikan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat (Kementerian Pertanian)	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Bidang Pertanian Kab. Tanjung Jabung Barat	Program/ Kegiatan dalam Renja 2023
Terjaganya ketahanan pangan nasional,	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian	Terwujudnya pembangunan ekonomi pedesaan untuk peningkatan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kebijakan Pusat (Kementerian Pertanian)	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Bidang Pertanian Kab. Tanjung Jabung Barat	Program/ Kegiatan dalam Renja 2023
		pendapatan dan ketahanan pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Meningkatkan kualitas SDM pertanian	Terwujudnya tertib birokrasi pertanian	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Pembinaan, Pelatihan, dan Kegiatan	Program Penyuluhan Pertanian
Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima		Meningkatnya Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 mengacu menggunakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :

- a. Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, dan
- b. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Sasaran

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Tahun 2021	Target
					Tahun 2023
1.	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Hortikultura	66,8	70
2.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (kw/Ha)	136,51	131,21
			Peningkatan Produktivitas Hortikultura (kw/Ha)	61,55	300,60

Untuk indikator dari **Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel** adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan indikator dari **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura** adalah Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Hortikultura) terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi, salah satunya ada pada kegiatan usaha pertanian sub sektor tanaman hortikultura. Kontribusi sektor pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari Buku Tanjung Jabung Barat Dalam Angka yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3 Program dan Kegiatan

Sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati tanjung jabung barat periode 2021 - 2026, yakni : "*Menuju Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*". Dari misi bupati dan wakil bupati tanjung jabung barat yang terkait dan menjadi tugas dari dinas tanaman pangan dan hortikultura kabupaten tanjung jabung barat adalah misi ke-3, yaitu : *Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*.

Sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, maka dalam periode 2021 - 2026 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura diantaranya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 - C. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - D. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - F. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- G. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- A. Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Sub Kegiatan : - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dKomoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- B. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- A. Kegiatan : Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Sub Kegiatan : - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- B. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan : - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman
5. Program Penyuluhan Pertanian
- Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Sub Kegiatan : - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Selain itu, rancangan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 disusun untuk mengakomodir usulan prioritas dari beberapa usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Desa, serta untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran (Pokir) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2019-2024.

Sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2021 - 2026, yakni : *Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*. Dan dari Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Misi ke-4, yaitu : *"Peningkatan Aktivitas Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan"*, maka pada Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada **Tabel 4.1** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 pada halaman berikut.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Kab. Tanjab Barat	72	16.168.542.500	APBD		75	15.782.837.250
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjab Barat	12 Dokumen	328.750.000	APBD		12 Dokumen	336.968.750
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanjab Barat	7 Dokumen	153.750.000	APBD		7 Dokumen	157.593.750
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanjab Barat	5 Laporan	175.000.000	APBD		5 Laporan	179.375.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	Kab. Tanjab Barat	12 Laporan	13.167.500.000	APBD		12 Laporan	13.458.506.250
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjab Barat	94 Orang/bulan	13.017.500.000	APBD		94 Orang/bulan	13.342.937.500
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	115.568.750
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	Kab. Tanjab Barat	100%	131.200.000	APBD		100%	134.480.000
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tanjab Barat	1 Paket	107.625.000	APBD		1 Paket	110.315.625

3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tanjung Barat	10 Orang	23.575.000	APBD		10 Orang	24.164.375
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	872.890.000	APBD		12 Laporan	894.712.250
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	1 Paket	5.535.000	APBD		1 Paket	5.673.375
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	15 Paket	114.800.000	APBD		15 Paket	117.670.000
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	1 Paket	51.250.000	APBD		727 Paket	52.531.250
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	36 Paket	64.575.000	APBD		36 Paket	66.189.375
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	5 Dokumen	6.355.000	APBD		5 Dokumen	6.513.875
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	630.375.000	APBD		12 Laporan	646.134.375
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan	Kab. Tanjung Barat	87 Unit	762.000.000	APBD		-	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	1 Unit	500.000.000	APBD		-	

3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	61 Unit	172.000.000	APBD		-	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	25 Unit	90.000.000	APBD		-	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanjung Barat	25 Laporan	361.927.500	APBD		25 Laporan	400.288.125
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjung Barat	1 Laporan	3.177.500	APBD		1 Laporan	3.256.938
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	117.875.000	APBD		12 Laporan	120.821.875
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	240.875.000	APBD		12 Laporan	246.896.875
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan Baik	Kab. Tanjung Barat	134 Unit	544.275.000	APBD		134 Unit	557.881.875
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tanjung Barat	1 Unit	41.000.000	APBD		1 Unit	42.025.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tanjung Barat	116 Unit	460.225.000	APBD		116 Unit	471.730.625
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tanjung Barat	15 Unit	11.275.000	APBD		15 Unit	11.556.875
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kab. Tanjung Barat	1 Unit	31.775.000	APBD		1 Unit	32.569.375

	Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							
3.27.02.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Kab. Tanjab Barat	2%	3.363.250.000	APBD		2%	6.829.062.500
		Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Kab. Tanjab Barat	2%				2%	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab. Tanjab Barat	2%	2.645.750.000	APBD		2%	6.829.062.500
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	1.825.750.000	APBD		1 Laporan	5.253.125.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	820.000.000	APBD		1 Laporan	840.500.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab. Tanjab Barat	2%	717.500.000	APBD		2%	735.437.500
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kab. Tanjab Barat	1 VUB	717.500.000	APBD		1 VUB	735.437.500
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Sesuai Peruntukan (%)	Kab. Tanjab Barat	63,81	14.074.375.000	APBD		64,45	14.378.734.375
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Indeks Pengembangan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan	Kab. Tanjab Barat	23	6.218.125.000	APBD		24	6.487.609.375

		Hortikultura sesuai Peruntukan							
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	6.218.125.000	APBD		1 Dokumen	6.487.609.375
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Indeks Pembangunan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peruntukan	Kab. Tanjab Barat	40,81	7.856.250.000	APBD		40,45	7.891.125.000
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	6 Unit	666.250.000	APBD		3 Unit	682.906.250
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	31 Unit	4.022.500.000	APBD		2 KM	525.312.500
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	13 Unit	632.500.000	APBD		10 Unit	525.312.500
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP beserta Sarana Pendukungnya yang dibangun/diperbaiki	Kab. Tanjab Barat	3 Unit	775.000.000	APBD		1 BPP	157.593.750
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Tanjab Barat	51 Unit	1.880.000.000	APBD		201 Unit	6.000.000.000
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Fasilitas Pengendalian Bencana Pertanian	Kab. Tanjab Barat	100%	892.309.627	APBD		100%	914.617.368

3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura	Kab. Tanjab Barat	100%	892.309.627	APBD		100%	914.617.368
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Tanjab Barat	1.000 Ha	410.000.000	APBD		1.000 Ha	420.250.000
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Tanjab Barat	1.000 Ha	179.375.000	APBD		1.000 Ha	183.859.375
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Tanjab Barat	1.500 Ha	251.684.627	APBD		1.500 Ha	257.976.743
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kab. Tanjab Barat	1 Laporan	51.250.000	APBD		1 Laporan	52.531.250
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab. Tanjab Barat	25%	7.218.050.000	APBD		25%	7.398.501.250
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Kab. Tanjab Barat	100%	7.218.050.000	APBD		100%	7.398.501.250
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang	Kab. Tanjab Barat	1 Unit	2.031.550.000	APBD		1 Unit	2.082.338.750

	Desa	Ditingkatkan Kapasitasnya							
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Padang	1 Unit	984.000.000	APBD		1 Unit	1.008.600.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Tanjab Barat	1 Unit	3.587.500.000	APBD		1 Unit	3.677.187.500
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	Kab. Tanjab Barat	1 Unit	205.000.000	APBD		1 Unit	210.125.000
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Tanjab Barat	1 Unit	410.000.000	APBD		1 Unit	420.250.000
					41.716.527.127				45.303.752.743

BAB V

PENUTUP

Rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang telah disusun ini merupakan acuan atau pedoman yang bersifat konseptual dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dan sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

Rancangan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Maret 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005